

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Aksi penolakan pengesahan RUU KUHP yang dianggap bermasalah terjadi pada akhir bulan September 2019. Tepatnya pada 24 September 2019, mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta di depan gedung DPR untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), aksi yang di suarakan mahasiswa tersebut tidak hanya terjadi di jalanan saja akan tetapi terjadi di media sosial seperti *twitter*. Dengan menggunakan *#HidupMahasiswa* hal tersebut menjadi *trending topic* di Indonesia bahkan di dunia.

Menurut berita yang ditulis Yantina Debora pada media *online* Tirto.id pada 24 September 2019 pasal-pasal dalam RUU KUHP tersebut di antaranya tentang gelandangan, dalam pasal 402 RKUHP tersebut menjelaskan setiap orang yang bergelandangan di jalanan maupun di tempat umum yang mengganggu kepada ketertiban umum, pidana denda dengan paling banyak dengan kategori I atau denda paling banyak satu juta rupiah, sehingga di anggap bermasalah oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat oleh karenanya bersebrangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan lainnya.

Sebelum aksi besar-besaran unjuk rasa yang terjadi di Jakarta mahasiswa-mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi yang serupa dengan skala yang lebih kecil seperti yang terjadi di jalanan Yogyakarta yang kemudian menjadi *trending* di media sosial *twitter* dengan menggunakan *#GejyanaMemanggil*.

Dalam aksi tersebut, ada hal yang berbeda dari aksi unjuk rasa yang di lakukan mahasiswa-mahasiswa yang membawa papan aksi dan bertuliskan tidak biasa atau

nyeleneh seperti: Rembo Salah Apa ?, Asap ini Menghalangi Ketampananku !, Jangan Matikan KPK Matikan Saja Mantanku ! dan masih banyak lagi lainnya.

Sebelumnya demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menolak RUU KUHP, papan aksi yang dibawa demonstran ke lokasi unjuk rasa menggunakan ungkapan yang menggunakan kalimat langsung, singkat, dan tegas seperti: Tolak!, Bubarkan!, dan Hentikan!. Namun, kali ini tulisan pada papan aksi yang di gunakan demonstran dalam berunjuk rasa menggunakan yang *nyeleneh*, jenaka, luwes.

Papan aksi itu mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai khalayak, termasuk warganet. Papan aksi tersebut menjadi pembicaraan di media sosial hingga menjadi *trending*. Papan-papan aksi tersebut bermunculan di media sosial sebagai tindakan kolektif mendukung aksi menolak pengesahan RUU KUHP. Tidak hanya papan aksi tersebut, warganet turut berpartisipasi melancarkan protes terhadap RUU KUHP melalui *hashtag* atau tagar di media sosial seperti *#HidupMahasiswa* dan memviralkan foto-foto ataupun kejadian yang terjadi di lokasi demonstrasi mahasiswa selama aksi berlangsung.

Jenkins (dalam Murwani, 2017) menjelaskan budaya partisipatif merujuk pada budaya dimana orang-orang (baik sebagai pribadi maupun publik) tidak hanya bertindak sebagai konsumen, akan tetapi juga menjadi penyumbang atau produser. Murwani (2017) menjelaskan internet dapat memungkinkan setiap orang untuk menciptakan serta dapat mempublikasikan media melalui internet. Web 2.0 yang digambarkan dalam budaya baru dapat menghubungkan internet.

Teknologi komunikasi dalam hal ini, yaitu internet, sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, yang kemudian menghasilkan sebuah inovasi yaitu media sosial. Dalam konteks budaya partisipatif ini, media sosial mampu digunakan dalam berbagi dan bertukar fungsi seperti ide, gagasan, maupun informasi. Partisipasi dalam media sosial bukan hanya dalam bentuk ide, gagasan, maupun informasi tetapi bisa juga didalam bentuk aksi protes atau menggaungkan aksi demonstrasi yang terjadi di dunia luar jaringan.

Enikolopov, Makarin, Petrova (2009) pernah melakukan riset mengenai partisipasi protes di media sosial dengan mengamati kasus demonstrasi di Rusia. Enikolopov dkk (2009) menjelaskan bahwa media sosial memiliki efek kausal pada peristiwa dan ukuran aksi demonstrasi di Rusia pada bulan Desember 2011. Mereka juga menunjukkan bahwa media sosial juga meningkatkan dukungan kepada pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ketiganya menyiratkan bahwa media sosial dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah pada tindakan kolektif. Sebab, media sosial mempengaruhi aktivitas protes dengan mengurangi biaya aksi kolektif, dibandingkan menyebarkan informasi yang kritis terhadap pemerintah atau meningkatkan polarisasi politik.

Media sosial dapat mempengaruhi aktivitas protes karena setiap orang bisa tetap melakukan tindakan kolektif di media sosial. Tidak hanya itu, media sosial juga dapat memberi ruang pada orang-orang yang mendukung pemerintah. Kondisi ini memungkinkan dua pendapat mengenai politik bertemu di media sosial.

Penggunaan media sosial sebagai medium partisipasi protes sudah terjadi sejak era Arab spring pada 2010-an. Menurut Poel & Van Dijck (2018), sejak Arab Spring hingga gerakan protes Gezi Park, Turki, pada 2013, gerakan-gerakan protes kontemporer besar disertai dengan aktivitas media sosial yang intens. Jutaan pengguna media sosial telah terlibat dalam produksi dan peredaran materi aktivis, termasuk tagar protes, desas-desus, dan foto-foto yang dipotret, laporan saksi mata, dan bukti video dari tangan pertama (Poel & Van Dijck, 2018).

Poell (2019) menjelaskan meningkatnya penggunaan media sosial mempengaruhi temporalitas atau kesementaraan dari komunikasi protes. Media sosial memberikan peluang baru, tetapi juga tantangan baru bagi para aktivis yang berusaha membentuk bagaimana protes dirasakan dan disahkan oleh publik. Infrastruktur media, institusi, dan praktik aktivis membentuk konfigurasi atau bentuk yang bersifat temporal (sementara) mengenai bagaimana protes dikomunikasikan dan ditafsirkan.

Aktivitas protes yang dikomunikasikan dan ditafsirkan di media sosial merupakan hasil bentukan atau konstruksi dari media massa, instansi pemerintah atau

lembaga negara, dan praktik yang dilakukan oleh aktivis ketika melakukan unjuk rasa di lapangan. Warga di media sosial menafsirkan pesan-pesan terkait aksi protes yang terjadi di jalanan untuk kemudian mengungkapkan pendapatnya sebagai bagian dari menggaungkan protes. Aksi warga di media sosial (warganet) ini menjadi tindakan kolektif dalam bentuk partisipasi protes. Kondisi ini seperti yang terjadi ketika unjuk rasa mahasiswa melakukan demonstrasi menolak pengesahan RKUHP yang mendorong warganet di media sosial turut mengeluarkan pendapat dan opini mengenai isu tersebut.

Berdasarkan observasi prariset penulis, aksi mahasiswa yang terangkum dalam #HidupMahasiswa menjadi *trending topic* di media sosial *Twitter* selama aksi unjuk rasa berlangsung. Menurut Puspita (2016). *Twitter* Merupakan situs web yang dioperasikan serta di miliki oleh *Twitter Inc* dan di buat oleh Jack Dorsey pada tahun 2006, *Twitter* berbasis di San Brunomor, California. Berbeda dengan media sosial lainnya terdapat tampilan yang menarik seperti: *Tweet* Umum, Sebutan, Balasan, dan juga jenis *Tweet* Tambahan.

Hasil observasi prariset juga menunjukkan sejumlah akun di media sosial *Twitter* yang turut menyebarkan *meme* politik terkait dengan aksi mahasiswa yang menolak pengesahan RKUHP dan RUU KPK. Akun-akun tersebut, yakni @Debrisumule, @Cyberskuad, @QusairFasa, dan @Yeahmahasiswa. Berikut adalah beberapa akun yang mengunggah gambar maupun foto demonstrasi mahasiswa di media sosial *twitter* yang menggunakan #HidupMahasiswa di antaranya:

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Followers dan Retweet

Akun	Followers	Retweet	Like	Comments
@yeahmahasiswa	927.448	21.449	19.969	766
@Debrisumule	180.610	4.545	7.758	45
@CyberSkwad	32.187	684	2.154	13
@Elwahyu_Kamal	8.061	36	212	7

Akun @Debrisumule merupakan akun pribadi seorang *influencer* media sosial yang juga memiliki akun di Instagram dan Youtube. @Cyberskuad merupakan akun pseudonim atau dengan identitas tidak jelas di mana akun ini mengunggah foto-foto dari lokasi demonstrasi sekaligus mengunggah berita. Akun @Elwahyu_Kamal merupakan akun *twitter* seorang guru.

Sementara akun yang juga mengunggah foto demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP, yaitu @Yeahmahasiswa, merupakan akun yang memfokuskan pada kehidupan mahasiswa. Akun @Yeahmahasiswa merupakan akun yang membahas kehidupan mahasiswa melalui gambar, foto, video, dan meme. Berdasarkan pantauan peneliti pada 10 Maret 2020 pukul 15.33 WIB, akun Twitter @Yeahmahasiswa memiliki 927.448 *followers* atau pengikut.



Gambar 1.1 Akun Twitter @Yeahmahasiswa

Sumber : Twitter @Yeahmahasiswa

Pada aksi demonstrasi menolak pengesahan RUU KUHP, akun ini turut menyuarakan protes melalui media sosial. Akun ini mengunggah gambar atau foto

Akun @yeahmahasiswa berbeda dengan akun lainnya yang mengunggah gambar maupun video yang tidak selalu berkaitan dengan aksi sebagai kritik akan tetapi akun @yeahmahasiswa didapati selalu memposting gambar maupun video yang berkaitan dengan aksi kritik lewat gambar maupun video maupun meme keseharian seorang mahasiswa dan memiliki pengikut kurang lebih satu juta.

Unjuk rasa yang kreatif yang kemudian diunggah ke media sosial menunjukkan bahwa demonstrasi saat ini tidak harus dengan secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui media sosial. Warganet dapat berpartisipasi melakukan protes lewat unggahan di media sosial. Partisipasi protes warganet dengan mengunggah dan memviralkan foto-foto demonstrasi mahasiswa di media sosial merupakan bentuk ekspresi kritik sosial.

Menurut Romadhona (2017), kritik sosial merupakan sindiran terjadi di dalam masyarakat dan ditunjukkan terhadap suatu hal dan terdapat suatu konfrontasi dalam realitas seperti kebobrokan maupun kepincangan. Kritik sosial juga menunjukkan suatu kehidupan yang dinilai tidak selaras dan tidak harmonis serta masalah sosial yang tidak dapat di atasi yang mengarah pada dampak dalam masyarakat dan perubahan sosial.

Kritik sosial dalam partisipasi protes terkait demonstrasi mahasiswa menolak RUU KUHP di berbagai daerah dalam media sosial ditujukan kepada DPR RI dan pemerintah selaku pihak yang membahas RUU KUHP. Akun media sosial *twitter* @yeahmahasiswa turut berpartisipasi melakukan protes lewat unggahan-unggahan yang memuat kritik sosial. Kritik sosial yang dilakukan lewat partisipasi protes muncul dalam tanda verbal dan non-verbal di dalam foto-foto yang diunggah.

Berdasarkan penelusuran, penulis menemukan tiga penelitian terdahulu terkait dengan partisipasi protes di media baru ketika ada aksi demonstrasi. Penelitian pertama, yakni Nowak Jakub (2013) yang berjudul “Political Communication, Social Media and Popular Culture: The Adisucks Facebook Protest Case Study” yang memfokuskan pada kajian komunikasi politik di media sosial. Penelitian ini tentang protes melalui Facebook yang menunjukkan media sosial dapat berfungsi sebagai

ruang simbolis dan partisipasi dalam proses kolaborasi penyebaran pesan politis di akar rumput.

Penelitian kedua dilakukan oleh Michael Chan (2016) berjudul “Media Uses and the Social Identity Model of Collective Action: Examining Online Alternative News and Social Media News”. Penelitian ini mengkaji potensi media sosial merangsang awal mula terjadinya partisipasi protes dari sisi identitas, keberhasilan, dan kemarahan.

Penelitian ketiga, yakni Ruben Eniklov, Alexey Makarin, dan Maria Petrova (2019) dari Universitas Pompeou Farba (Barcelona, Spanyol). Dalam penelitian berjudul “Social Media and Protest Participation Evidence From Russia, Eniklov, Makarin, dan Petrova meneliti dengan partisipasi protes pada media sosial di Rusia.

Tiga penelitian di atas memfokuskan pada partisipasi protes di media sosial. Konsep tersebut sama dengan konsep yang digunakan pada penelitian ini. Perbedaannya, yakni penelitian ini melihat partisipasi protes yang dilakukan oleh warganet atau netizen sebagai bentuk kritik sosial.

Kritik sosial yang disampaikan oleh mahasiswa kemudian digaungkan oleh warganet menggunakan bahasa yang tidak baku, melainkan luwes, jenaka, dan *nyeleneh*. Selain itu, isu-isu yang diangkat juga pada persoalan ranah pribadi, bukan ranah publik.

Kritik sosial terwujud dalam verbal dan nonverbal dalam foto papan unjuk rasa menolak RUU KUHP dalam unggahan di media sosial *Twitter* yang dilengkapi dengan *caption* atau keterangan foto dan tagar. Bahasa verbal dan nonverbal dalam unggahan di *Twitter* menjadi tanda yang akan menunjukkan makna kritik sosial dalam partisipasi protes di media sosial.

Perlakuan pesan sebagai tanda ini juga menunjukkan adanya perbedaan metode dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu melakukan analisis terhadap foto dan gambar, analisis data statistik, dan survei. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis tanda-tanda tersebut dengan metode semiotika.

Menurut Mudjiyanto dan Nur, (2013), metode analisis semiotika merupakan metode analisis dalam mengkaji suatu tanda yang memiliki makna di kehidupan manusia. Pada dasarnya, semiotika mempelajari dan memaknai suatu hal yang ada. Dalam hal ini, objek-objek dapat dimaknai sebagai suatu informasi. Segala sesuatu sebagai tanda yang berkaitan dan mempunyai fungsi. Semiotika dapat mempelajari aturan yang memungkinkan dan mengartikan sebuah tanda.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan penulis berusaha untuk menjelaskan kritik sosial demonstrasi mahasiswa lewat media sosial. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **Kritik Sosial Melalui Partisipasi Protes di Media Sosial (Analisis Semiotika Pada Foto Demonstrasi Mahasiswa di media sosial Twitter Akun @Yeahmahasiswa)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana makna kritik sosial muncul melalui bentuk-bentuk partisipasi protes menolak RUU KUHP melalui media sosial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kritik sosial pada media sosial, partisipasi protes warganet pada media sosial, dan makna tanda-tanda pada pesan di media sosial.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi para pembaca, serta menambah wacana penelitian Budaya Partisipasi pada umumnya.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan bahan bacaan dalam Kritik Sosial Melalui Partisipasi Protes di Media Sosial dan berharap menjadi evaluasi bagi peneliti mengenai Budaya Partisipasi.

